

DAMPAK INPRES PADA BIDANG SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 1966-1991

Oleh: Nurjannah Yuliani Adimurni

13407144010

Abstrak

Pada masa Orde Baru, pemerintah menggiatkan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemangku kebijakan, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerapkan kebijakan hingga ke daerah-daerah terisolir melalui proyek-proyek Inpres. Proyek-proyek Inpres yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya yaitu Proyek Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten dan Intensifikasi Tebu Pertanian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui penerapan dan dampak Inpres pada bidang sosial ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis yang mengacu pada studi pustaka. Metode penulisan yang digunakan terdiri dari beberapa langkah. Pertama, *heuristik* yang merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber sejarah untuk memperoleh data yang relevan. Kedua, *kritik sumber* yaitu kegiatan untuk mengkaji otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber sejarah. Ketiga, *interpretasi* merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah serta mencari hal-hal yang saling berhubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah rangkaian fakta yang bermakna dan logis. Keempat, *historiografi* merupakan proses penyampaian hasil interpretasi secara kronologis dan sistematis dalam bentuk karya sejarah.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kondisi umum Kabupaten Kulon Progo sebelum pelaksanaan proyek Inpres masih begitu terisolir, mata pencaharian masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani, dan sebagian lainnya masih kekurangan lapangan pekerjaan. Kebijakan Inpres membawa pengaruh bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, disebabkan adanya pembangunan jalan-jalan kabupaten yang semakin membuka akses ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat Kabupaten Kulon Progo sangat terbuka terhadap proyek Inpres karena adanya perubahan ke arah positif dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dampaknya ketika pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerapkan proyek Inpres, diantaranya, banyak jalan-jalan di Kabupaten Kulon Progo menjadi mudah dilalui dan lahan pekerjaan menjadi lebih beraneka ragam.

Kata Kunci: Inpres, Kulon Progo, Sosial Ekonomi.

Abstract

During the New Order period, the government intensified development that aimed at improving the welfare of the people. As stakeholders, the government is implementing policies to isolated areas through Inpres projects. Inpres projects implemented in Kulon Progo Regency are District Road Assistance Supporting Project and Intensification of Sugarcane Agriculture. The purpose of this study is to determine the applicability and the impact of Inpres on socio-economic field in Kulon Progo.

This thesis is using the method of critical history; refers to the study of the literature. The writing method used is consisted of several steps. The first is the heuristic, which is an activity that is looking for the historical sources to acquire the relevant data. The second is source of criticism, namely an activity to assess the authenticity and the credibility of the sources of history. The third is the interpretation, which is the process of interpretation against the historical facts as well as looking for things that are interconnected between facts with the other, so that it becomes a series of meaningful and logical facts. The fourth is historiography, which is the process of delivering the results chronologically and systematic interpretation in the form of historical work.

Based on the studies that have been done shows that the general condition of Kulon Progo Regency before the implementation of *Inpres* project is still isolated, the livelihood of many people is a farmer, and some others still lack of employment. The Inpres policy has influenced the people of Kulon Progo Regency, due to the development of district roads that lead to the broader economic access and job opening, as well as the implementation of sugarcane intensification projects requiring large areas of land and manpower in large quantities. The people of Kulon Progo Regency are very opened to the *Inpres* project because of the positive changes to the policies implemented by the government. The impact is when the government of Kulon Progo Regency implemented the Inpres project, among others, many of the roads in Kulon Progo Regency became easy to pass and the work field became more diverse.

Key words: *Inpres*, Kulon Progo, Social Economy.

A. Pendahuluan

Masa pemerintahan era Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru (Orba) yang dimulai tahun 1966. Kebijakan-kebijakan baru mulai dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan tentang Instruksi Presiden (Inpres). Inpres merupakan suatu usaha untuk menciptakan keserasian dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Pembangunan tersebut ditunjang dengan adanya program-program bantuan yang ditujukan untuk daerah.

Perubahan politik dalam negeri menyebabkan jatuhnya Presiden Soekarno kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto. Setelah pergantian presiden yang dipimpin oleh Presiden Soeharto kemudian dikenal dengan lahirnya Orde Baru (Orba) tidak terlepas dari sejarah panjang Indonesia. Selama tahun 1966, menjadi tugas utama pemerintahan baru mencapai persetujuan-persetujuan untuk “penjadwalan kembali” dengan kreditor luar negeri Indonesia di mana bebab utang ditanggihkan. Persetujuan-persetujuan ini setiap tahunnya dirundingkan lagi sampai tahun 1969, ketika dengan berbagai kesulitan untuk menyelesaikan penyelesaian jangka panjang dari utang-utang “Sukarno”.¹ Pergantian kepemimpinan ini membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang merupakan produk hukum pertama dan terakhir yang mengatur tentang pemerintahan di daerah dalam masa kepemimpinan Presiden Suharto.²

Pada masa Orde Baru dicanangkan Trilogi Pembangunan yang mana menjadi landasan menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial demi terselenggaranya pembangunan negara. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan terbukanya lapangan kerja yang

¹ H.W. Arndt, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 89.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Menggugat Keistimewaan Jogjakarta: Tarik Ulur Kepentingan, Konflik Elit, dan Isu Perpecahan*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009), hlm. 136.

memadai. Dengan demikian, maka pada masa itu banyak diselenggarakan pembangunan yang salah satunya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diselenggarakan masa Orde Baru antara lain sukses dalam kebijakan intruksi presiden. Instruksi Presiden (Inpres) banyak memberikan bantuan diantaranya dalam hal bantuan penunjang jalan kabupaten dan intensifikasi tebu.

B. Kondisi Umum Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo termasuk salah satu bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di sebelah barat. Kulon Progo atau dalam bahasa Jawa berarti sisi barat Sungai Progo³, terletak pada kordinat 7 derajat 50' lintang selatan dan 30 derajat 20' bujur timur (titik nol Jakarta).⁴ Kabupaten Kulon Progo secara umum termasuk dalam golongan daerah beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 21,3 – 32,7 derajat celcius dari mulai ketinggian 0 hingga 1.000 meter dari permukaan air laut. Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 586.28 km². Secara administratif Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan dan memiliki 88 kelurahan.

Kabupaten Kulon Progo semula merupakan hasil penggabungan dua kabupaten, yaitu antara Kabupaten Kulon Progo (di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta) yang beribukota di Sentolo dengan Kabupaten Adikarta (di bawah kekuasaan Kadipaten Pakualaman) yang beribukota di Wates. Sebelum adanya penggabungan, masing-masing kabupaten, baik Kabupaten Kulon Progo maupun Kabupaten Adikarta dibentuk berdasarkan UU No.15 Tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 8 Agustus 1950 yang mana masing-masing diberi hak otonomi.⁵ Hasil dari

³ *Profil Daerah Kabupaten dan Kota* (Jilid 2), (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 371.

⁴ Kantor Statistik Kabupaten Kulon Progo, *Kulon Progo dalam Angka 1983*, (Yogyakarta: Kantor Statistik Kabupaten Kulon Progo, 1983), hlm. 18.

⁵ Kantor Statistik Kabupaten Kulon Progo, *Kulon Progo dalam Angka 1984*, (Yogyakarta: Kantor Statistik Kabupaten Kulon Progo, 1984), hlm. 19.

kesepakatan penyatuan tersebut adalah dengan nama Kabupaten Kulon Progo yang beribu kota di Wates.

Daerah-daerah di Kabupaten Kulon Progo dibedakan menjadi 3 wilayah berdasarkan keadaan topografi. Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identifikasi jenis lahan.⁶ Hamparan di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi serta daerah perbukitan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengembangan pembangunan yang dilandasi atas potensi permasalahan yang sama. Sebab pembangunan di daerah Kabupaten Kulon Progo yang relatif masih minus, terisolir, dan padat penduduknya perlu diberi perhatian khusus yang lebih besar.⁷

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah agraris, dan lapangan kerja diluar agraris belum berkembang, angka ratio yang tinggi mengakibatkan terjadinya tekanan penduduk terutama di sektor agraris.⁸ Keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin di wilayah sumberdaya manusia miskin masih ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, dan sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian dan sektor-sektor tradisional.⁹ Pertumbuhan penduduk tersebut tidak didukung adanya pembukaan lapangan pekerjaan yang mencukupi.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo dan Bappeda Kabupaten Kulon Progo, *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2013*, (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo dan Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2013), hlm. 43.

⁷ Depo Arsip Kulon Progo, *Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo Tahun 1984*, Senarai Arsip Setwilda B, Nomor Arsip: 1963.

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Evaluasi dan Analisa Keadaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Bappeda Propinsi DIY, 1986/1987), hlm. 16.

⁹ Mangku Purnomo, *Pembaharuan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2004), hlm. 140.

Pada dasarnya Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah perbukitan dan wilayah landai.¹⁰ Wilayah perbukitan sangat potensial terhadap tanaman perkebunan dan hortikultura secara intensif dengan tanpa meninggalkan konservasi tanah. Apabila pemilihan lahan yang cocok dengan bibit tanaman sesuai maka keberhasilan panen pun akan dapat terjamin dengan baik. Hal ini diperlukan peran pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menentukan keberhasilan panen. Pemilihan bibit dan lahan serta pupuk yang sesuai akan menentukan keberhasilan panen.

C. Kebijakan Sosial Ekonomi di Kabupaten Kulon Progo

Pemberian bantuan dana yang diberikan dari pemerintah pusat disalurkan kepada pemerintah daerah berdasarkan pada hitungan perkapita/per kepala. Dengan demikian hal itu berdampak pada jumlah dana yang diberikan dari pemerintah pusat disetiap kabupaten berbeda-beda karena jumlah penduduk setiap kabupaten tidak sama. Bantuan dana dari pemerintah dalam menyediakan dana pembangunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik itu dari APBN dan APBD Daerah tingkat I maupun dari APBD Daerah Tingkat II itu sendiri¹¹, dan seiring dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Dana yang sangat besar dialokasikan dengan segera dan dalam jumlah yang semakin bertambah pada tahun-tahun berikutnya untuk program-program kesejahteraan sosial.¹² Dengan demikian maka, pemerataan dan meminimalisir masalah kesenjangan dalam pembangunan dapat segera terpenuhi dengan baik. Jumlah peningkatan dana itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁰ Depo Arsip Kulon Progo, *Laporan Bupati KDH Tingkat II Kulon Progo dalam Rangka Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan*, Nomor Arsip: 84.

¹¹ Ibid.

¹² H.W. Arndt, *op.cit*, hlm. 112.

Tabel 1
Pembiayaan Pembangunan di Kabupaten Kulon Progo

No.	Tahun	Pembangunan	Inpres	Jumlah
1.	1979/1980	162.781.130,63	75.693.000,-	917.474.130,63
1.	1980/1981	202.694.236,66	1.250.914.000,-	1.53.608.236,66
2.	1981/1982	282.390.330,--	1.956.752.000,-	2.239.142.330,--
3.	1982/1983	268.231.471,--	2.425.556.000,-	2.693.787.471,--
4.	1983/1984	291.798.143,13	2.222.520.000,-	2.514.318.143,13

Sumber: Depo Arsip Kulon Progo, *Laporan Bupati KDH Tingkat II Kulon Progo dalam Rangka Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan*, Nomor Arsip: 84.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dana Inpres setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dana pembangunan yang juga meningkat. Dana tersebut berasal dari APBD dan APBN yang setiap tahunnya meningkat. Dana yang digunakan untuk penunjang jalan kabupaten pada tahun 1982/1983 sebanyak Rp. 147.500,-; tahun 1983/1984 sebanyak Rp. 167.890,-; dan pada tahun 1984/1985 sebanyak Rp. 150.000,-.¹³

1) Inpres Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten

Instruksi bantuan penunjang jalan dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 1981 tentang Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Dati II Kulon Progo tahun 1981/1982. Pada masa Bupati Widjoyo Hadiningrat membedah pegunungan menoreh menghubungkan jalan-jalan diaspal supaya angkutan diatas itu bisa turun dengan baik.¹⁴ Dengan cara memperlebar badan jalan untuk memudahkan jalur-jalur transportasi masuk ke Kabupaten Kulon Progo. Pada saat itu tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan dilakukan dengan cara pembebasan tanah.¹⁵

Dengan demikian realisasi Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten berdasarkan Instruksi Presiden Nomor: 9 tanggal 6 Mei tahun 1981,

¹³ Ibid.

¹⁴ Agus Anggono, Wawancara tanggal 26 Oktober 2016.

¹⁵ Joko Setiyono Adi, Wawancara tanggal 19 Juni 2017.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS Nomor: 113 Tahun 1981: Nomor: 261/KMK.03/1981; Nomor: 142/Kpts/1981; Nomor: 987/K/5/1981; dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 tahun 1981 tanggal 11 Mei 1981; Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini mengesahkan proyek yang diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan proyek-proyek Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten telah menghabiskan dana sebanyak Rp. 270.838.000,-.

2) Inpres Bantuan Intensifikasi Tebu Rakyat

Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) merupakan sebuah perusahaan tebu rakyat yang diatur sebagai salah satu program intensifikasi pertanian dengan pola tertentu, yaitu intensifikasi yang dilakukan dalam kaitan kerja sama dengan kelompok tani pada suatu hamparan usaha tani guna memanfaatkan potensi lahan daya dan dana secara optimal dengan menerapkan teknologi yang telah diatur atau ditentukan. Para petani tebu akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah untuk menunjang penanaman tebu agar hasilnya baik supaya tidak melakukan impor gula.¹⁶ Tebu juga mudah ditanam pada tanah marginal, tapi paling bagus tanah sawah.¹⁷ Menurut Sudadi salah seorang pemilik lahan tebu sekaligus mengawasi langsung para petani tebu, keberhasilan penanaman tebu ditentukan oleh kesiapan lahan, bibit yang berkualitas, pengolahan tanah yang bagus, dan pemberian pupuk yang tepat waktu.

Pelaksanaan intensifikasi tebu rakyat sesuai dengan Instruksi Presiden No.9 tahun 1975 tanggal 22 April 1975. Demi kelancaran

¹⁶ Sudadi, Wawancara 20 Juni 2017.

¹⁷ Ibid.

administrasi pekerjaan sehari-hari diurus oleh team teknis Tebu Rakyat sesuai dengan keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 237/1975.

Tabel 2
Hasil Produksi Tebu Rakyat di
Kabupaten Kulon Progo Tahun 1981-1987(Ton)

No.	Tahun	Hasil Produksi	Jenis Tanaman
1.	1981	-	Produksi Tebu Rakyat
2.	1982	-	
3.	1983	1.140,47	
4.	1984	1.148,42	
5.	1985	1.330,08	
6.	1986	1.956,62	
7.	1987	1.868,55	

Sumber: *Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1987*, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1988/1989.

Dari data di atas dapat diketahui hasil produksi Tebu Rakyat dari tahun 1983 sampai tahun 1986 mengalami peningkatan. Peningkatan produksi tebu paling menonjol pada tahun 1986 sebanyak 1.956,62 ton dari sebelumnya hanya 1.330,08 ton produksi pada tahun 1985. Selanjutnya mengalami sedikit penurunan produksi sebanyak 88,07 ton produksi tebu.

Tabel 3
Rata-rata Produksi Tebu Rakyat Per Hektar Tahun 1981-1987

No.	Tahun	Hasil Produksi	Jenis Tanaman
1.	1981	5,16	Produksi Tebu Rakyat
2.	1982	6,26	
3.	1983	2,91	
4.	1984	3,08	
5.	1985	4,12	
6.	1986	4,29	
7.	1987	3,72	

Sumber: *Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1987*, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1988/1989.

Dari tabel data di atas dapat diketahui rata-rata produksi tanaman perkebunan Tebu rakyat setiap tahun berbeda-beda. Hasil produksi Tebu rakyat di

Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata hasil produksi paling banyak pada tahun 1982 sebesar 6,26 ton per hektar dan paling rendah pada tahun 1983 sebesar 2,91 ton per hektar.

D. Dampak Sosial Ekonomi Pelaksanaan Inpres di Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui proyek Inpres mengalirkan dana pembangunan diantaranya yaitu melalui proyek Inpres Penunjang Jalan Kabupaten dan Intensifikasi Tebu Pertanian. Setiap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka akan berdampak pada lingkungan, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri, baik dampak pada bidang sosial maupun bidang ekonomi.

Pemerintah menciptakan strategi untuk meningkatkan ekonomi melalui pelaksanaan Inpres pembangunan dalam bidang pertanian dan infrastruktur. Program pemerintah seperti proyek-proyek Inpres yang padat karya mempunyai pengaruh positif dari segi pengurangan pengangguran dan kemiskinan.¹⁸ Inpres tersebut terkait Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten dan Intensifikasi Tebu Pertanian. Proyek pembangunan penunjang jalan baru dimulai pada tahun anggaran 1981/1982. Selama proyek berlangsung sudah dikerjakan sebanyak 27 proyek berupa jalan sepanjang 113,3 km, gorong-gorong sebanyak 69 buah, jembatan sepanjang 88 m. Selanjutnya pada tahun anggaran 1984/1985 telah terbangun proyek jalan dengan panjang 12,60 km dan 1 buah jembatan dengan panjang 200 m. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan pertanian saling terkait untuk mendorong peningkatan perekonomian.

Pemerintah mempunyai tantangan utama tentang bagaimana merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan yang menurut sebagian besar masyarakat mempunyai manfaat luas, dan bagaimana melaksanakan disiplin sendiri supaya pemerintah dapat membatasi campur tangannya agar tidak merugikan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Anne Booth dan Peter Mc Cawley, *Ekonomi Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 27.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

Proyek pembangunan bantuan penunjang jalan kabupaten diarahkan untuk memperlancar arus pengangkutan dan distribusi serta menunjang proyek-proyek pembangunan di daerah, membuka daerah terpencil dan daerah pertanian. Hal itu sebagai sebab adanya perbaikan jalan-jalan di pedesaan berkat program Inpres dan program-program lainnya yang serupa.²⁰

Pembangunan pada bidang pertanian merupakan salah satu langkah baik untuk mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan. Usaha meningkatkan produktivitas pertanian salah satunya melalui program pemerintah yaitu Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1979, Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 dan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1993. Proses pembangunan melalui proyek Inpres baik Proyek Bantuan Penunjang Jalan maupun Intensifikasi Tebu Pertanian telah berjalan pada masa Orde Baru. Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dapat berupa dampak primer dan sekunder. Dampak yang bersifat primer ini menimbulkan perubahan lingkungan yang secara nyata dan langsung terjadi akibat adanya suatu tindakan. Dampak yang bersifat sekunder yaitu suatu perubahan yang ditimbulkan sebagai kelanjutan akibat dari dampak primer.

Perubahan primernya yaitu perubahan lingkungan akibat pembangunan jalan yang semakin bagus dan penggunaan lahan untuk jalan. Masyarakat sangat terbuka dengan dibangunnya proyek pembangunan jalan ini. Lahan-lahan milik masyarakat yang dilalui sebagai jalan digunakan secara swadaya maupun dengan ganti rugi. Di samping itu banyak masyarakat yang diambil untuk ikut bekerja dalam proyek pembangunan jalan. Dampak sekundernya ialah jalan-jalan yang menjadi lebih halus mudah dilalui masyarakat menunjang fasilitas-fasilitas lainnya menjadi lebih mudah dijangkau.

Masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada saat itu sangat antusias dengan proyek-proyek pemerintah yang sedang digalakkan. Berbagai bidang di luar pertanian pedesaan, beberapa perubahan teknologi juga telah merembes ke kegiatan masyarakat yang secara tradisional dapat menjadi sumber kesempatan kerja bagi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

penduduk desa.²¹ Sementara itu pada proyek Intensifikasi Tebu Pertanian, dengan adanya perbaikan jalan ini, memudahkan pengangkutan tebu-tebu untuk dibawa ke Pabrik Gula Madukismo. Dengan begitu akses jalan yang mudah mendorong kepada bidang-bidang lainnya menjadi lebih mudah.

Pada bidang intensifikasi tebu rakyat juga banyak menggunakan tenaga manusia. Sebagai wujud usaha pemerintah mengurangi pengangguran. Pada proyek intensifikasi Tebu Rakyat tersebut banyak menggunakan tenaga masyarakat dalam hal menanam, merawat dan memanen. Hal itu juga berlaku pada Inpres Penunjang Jalan yang juga membutuhkan banyak masyarakat untuk dapat menjadi tukang batu, tukang kayu, tenaga dan dapat menjual barang atau material bangunan.

A. Dampak di Bidang Ekonomi

Sebelum dilakukan pembangunan jalan di Kabupaten Kulon Progo, kondisi jalan cukup buruk untuk dilalui. Apalagi kalau sedang terjadi musim hujan maka jalan-jalan berlubang banyak yang tergenang air. Tidak banyak kendaraan yang dapat melalui jalan-jalan tersebut. Dengan demikian, akses jalan sangat penting bagi kehidupan masyarakat untuk memudahkan mereka dalam mengakses dunia luar. Dengan ditunjangnya fasilitas masyarakat maka perkembangan di semua bidang menjadi mudah diraih karena telah dibuka satu akses penting yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Ekonomi terbuka karena ada yang membuka akses ekonomi.²²

Sementara itu, adanya industri gula di tengah-tengah masyarakat telah membantu ribuan penduduk pribumi di Yogyakarta, terutama di Kabupaten Kulon Progo memperoleh nafkah. Di samping itu juga telah merangsang penduduk pedesaan untuk melepaskan cara hidup mereka yang berorientasi pada tradisi dan memaksa mereka berhubungan dengan dunia luar.²³ Pada dasarnya penduduk yang

²¹ Anne Booth dan Peter Mc Cawley, *op.cit.*, hlm. 10.

²² Agus Anggono, Wawancara di Puro Pakualaman, 26 Oktober 2016.

²³ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 221.

memilih untuk bergabung dalam bagian penanaman tebu merupakan penduduk yang tidak memiliki tanah. Lahan yang dimanfaatkan untuk menanam tebu diambilkan dari kas desa atau tanah lungguh.²⁴ Sebagian dari mereka merupakan para petani tak bertanah yang berusaha untuk menjual tenaganya kepada siapa saja yang bersedia memberikan upah.

Jalur transportasi yang semakin baik memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk mengembangkan perdagangan dan sektor industri kecil, misalnya ialah industri tekstil atau perdagangan dalam skala kecil. Sarana transportasi dan akses pendukungnya yang semakin dipermudah oleh pemerintah mendorong masyarakat ke arah modernisasi. Hal ini sebagai dampak meluasnya penggunaan colt yang mana akibat dari kebijaksanaan pemerintah yang memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada pemilik kendaraan bermotor komersial setelah tahun 1973/1974.²⁵

Pada bidang ekonomi di Kabupaten Kulon Progo menitik beratkan pada sektor pertanian agar dapat meningkatkan produksi pangan dengan jalan intensifikasi dan peningkatan produktifitas tanah secara rasional. Di samping itu pemerintah juga meningkatkan biaya pembangunan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi kemajuan bersama. Pembiayaan pembangunan tersebut diambilkan dari APBD Daerah Tingkat I maupun dari APBD Daerah Tingkat II. Salah satunya melalui program intensifikasi tebu pertanian.

E. Kesimpulan

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di sebelah barat provinsi ini. Kabupaten Kulon Progo memiliki air tanah yang berasal dari pegunungan yang terdiri dari perbatuan andesit tua (Pegunungan Menoreh), perbukitan yang berbatuan gamping

²⁴ Jumpono, Wawancara 20 Juni 2017.

²⁵ Anne Booth dan Peter Mc Cawley, *op.cit.*, hlm. 10.

dan batu pasir napalan (Pegunungan Sentolo) serta daratan aluvial yang terletak di sebelah selatannya. Di pegunungan tersebut dapat dijumpai air tanah yang sangat dalam dan dangkal.

Bentuk penerapan pelimpahan wewenang tersebut dari pusat ke daerah ialah melalui pelaksanaan Intruksi Presiden (Inpres). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui usaha proyek Inpres mengalirkan dana pembangunan diantaranya yaitu melalui proyek Inpres Penunjang Jalan Kabupaten dan Intensifikasi Tebu Pertanian. Setiap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka akan berdampak pada lingkungan, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri, baik dampak di bidang sosial maupun bidang ekonomi.

Instruksi bantuan penunjang jalan dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 1981 tentang Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Dati II Kulon Progo tahun 1981/1982. Proyek bantuan penunjang jalan tersebut dilakukan dengan cara memperlebar badan jalan untuk memudahkan jalur-jalur transportasi masuk ke Kabupaten Kulon Progo. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan merelakan tanahnya untuk kepentingan umum, hal ini dilakukan karena masyarakat ingin perkembangan di wilayahnya.

Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) merupakan sebuah perusahaan tebu rakyat yang diatur sebagai salah satu program intensifikasi pertanian dengan pola tertentu, yaitu intensifikasi yang dilakukan dalam kaitan kerja sama dengan kelompok tani pada suatu hamparan usaha tani guna memanfaatkan potensi lahan daya dan dana secara optimal dengan menerapkan teknologi yang telah diatur atau ditentukan. Pelaksanaan intensifikasi tebu rakyat sesuai dengan Instruksi Presiden No.9 tahun 1975 tanggal 22 April 1975.

Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dapat berupa dampak primer dan sekunder. Dampak yang bersifat primer ini menimbulkan perubahan lingkungan yang secara nyata dan langsung terjadi akibat adanya suatu tindakan. Dampak yang bersifat sekunder yaitu suatu perubahan yang ditimbulkan sebagai kelanjutan akibat dari dampak primer. Selama pembangunan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui proyek Inpres yaitu proyek

pembangunan jalan kabupaten dan intensifikasi tebu pertanian menimbulkan dampak yang bersifat primer dan sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Depo Arsip Kulon Progo, *Laporan Bupati KDH Tingkat II Kulon Progo dalam Rangka Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan*, Nomor Arsip: 84.

Depo Arsip Kulon Progo, *Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo Tahun 1984*, Senarai Arsip Setwilda B, Nomor Arsip: 1963.

Buku-Buku:

Arndt, H.W., *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Evaluasi dan Analisa Keadaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Bappeda Propinsi DIY, 1986/1987.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo dan Bappeda Kabupaten Kulon Progo, *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2013*, Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo dan Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2013.

Booth, Anne dan Cawley, Peter Mc., *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1981.

Kantor Statistik Kabupaten Kulon Progo, *Kulon Progo dalam Angka 1983*, Yogyakarta: Kantor Statistik Kabupaten Kulon Progo, 1983.

_____, *Kulon Progo dalam Angka 1984*, Yogyakarta: Kantor Statistik Kabupaten Kulon Progo, 1984.

Mangku Purnomo, *Pembaharuan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*, Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama, 2004.

Profil Daerah Kabupaten dan Kota (Jilid 2), Jakarta: Kompas, 2003.

Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Menggugat Keistimewaan Yogyakarta: Tarik Ulur Kepentingan, Konflik Elit, dan Isu Perpecahan*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009.

Daftar Responden

No.	Nama	Usia	Pekerjaan	
			Dulu	Sekarang
1.	Agus Anggono	65 tahun	Pegawai BAPPEDA Kulon Progo (1978-2008)	Pegawai Puro Pakualaman
2.	Joko Setiyono Adi	39 tahun	Pelajar	Kasubag Perencanaan
3.	Jumpono	84 tahun	Petani	Pengurus Koperasi Tebu
4.	Sudadi	67 tahun	Lurah Kecamatan Temon	Pengurus Koperasi Tebu